BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna Perempuan di Ranah Politik Bagi Komunitas Pesantren Nazhatut Thullab Sampang Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014-2015

A. Keadaan Umum Desa Prajjan

1. Demografi Penduduk Desa Prajjan

Keberadaan demografi (Kondisi penduduk) bertalian dengan kondisi penduduk, meningkat dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk suatu daerah dapat diketahui melalui data-data yang terdapat dalam demografi daerah itu sendiri. Fungsi data demografi adalah sebagai informasi tentang pertumbuhan penduduk pada setiap perubahan tahun. Denga adanya demografi pada suatu daerah tertentu membantu pertumbuhan penduduk pada keadaan daerah tersebut setiap orang yang berkepentingan atau membutuhkan data-data.

Desa prajjan adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Camplong yang merup daerah daratan rendah yang mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut setingggi 100 meter. Adapun suu udara rata-rata berkisar 25-6 derajat calcius. Dan pusat pemerintahan desanya terletak kerang lebih 20 KM dari ibu kota kabupaten sampan.[61] Keadaan demografi yang dimaksud disini adalah gambaran statistic kondisi pertumbuhan penduduk desa prajan. Peduduk

[61]Badan pusat statistik kabupaten sampan, kecamatan camplong dalam angka (sampan: BPS,2007), hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berdomisili di desa prajjan secara resmi tercatat dalam sensus punduduk di kantor desa adalah sekitar 1.436 jiwa dari berbagai tingkatkan umur.[62] Keadaan desa prajjan yang penulis maksud disini hanya terbatas sekaligus difokuskan pada data-data penduduk yang masih hidup dari berbagai tingkatan usia, sesuai dengan data terakhir yang penulis peroleh. Berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur yang dapat dilihat dalam table di bawah ini.[63]

Tabel I
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Banyak
1.	Laki- Laki	745
2.	Perempuan	691
	Jumlah	1,463

Sumber: *Badan Pusat Statistik 2007*

Tabel II
Jumlah Penduduk
Menurut Tingkatan Umur

NO.	Usia	Banyak
1.	00 Sampai 04 Tahun	128
2.	05 sampai 0 Tahun	29
3.	07 sampai 15 Tahun	314

[62]Dukomen desa prajjan 2007

[63]Badan pusat statistik kabupaten sampan, kecamatan camplong dalam angka (sampan: BPS,2007), hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	16 sampai 22 Tahun	257
5.	23 sampai 59 Tahun	504
6.	60 Tahun Ke atas	204
	Jumlah	1,436

2. Letak Geografis Desa Prajjan

Desa Prajjan merup desa yang berada di wilayah Kabupaten sampan yang memiliki luas daerahnya kurang lebih 1.000 ha. Terdiri dari daerah bebatuan pemukiman, tebing, pegunungan, dengan rincian sebagai berikut.[64]

Sedangkan batas – batas Desa Prajjan sebagai berikut.[65]

Tabel IV

Batas Wilayah Desa Prajjan

Letak .	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Banjar Tambulu	Camplong
Sebelah Selatan	Desa Tambaan	Camplong
Sebelah Barat	Desa Dharma	Camplong
Sebelah Timur	Desa Banjar Tambulu	Camplong

Dari tabel tersebut dapat penulis gambarkan bahwa secara geografis letak desa prajjan lumayan strategis karena sudah dekat dengan

[64]Ibid
[65]Dokumen Desa Prajjan 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecematan dan sekaligus. Jika kita dari arah kota sampang untuk menuju Desa Prajjan melewati kecamatan camplong dengan menggun angkutan umum, untuk menuju ke desa prajjan menaiki delman, becak dan ojek.

3. Keadaan sosial keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung penulis mendapatkan keterangan berupa data tertulis bahwa penduduk desa prajjan semuaberagama islam. Sedangkan sarana peribadatan yang ada di desa prajjan dapat dilihat pada tabel berikut.[66]

Tabel V
Sarana Peribadatan
Desa Prajjan

NO.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushalla	25
3.	Pondok Pesantren	26
	Jumlah	71

Sumber : Dokumen Prajjan 2007

Mengenai kepercayaan penduduk prajjan beragama islam, sehingga budaya toleransi keislamannya semakin memperkokoh rasa persaudaraan yang sangat kental, tidak pernah muncul konflik yang dpat mengakibatkan keret ikatan persaudaraan warga desa prajjan. Terciptanya kedamaian itu dilatarbelgi oleh warga yang mayoritas saling menghormati dan saling

[66]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengargai satu sama lain. Dala aspek kultur keagamaan yang di anut masyarakat prajjan adalah kultu Nahdatul Ulama. Hal ini sesuai dengan masyarakatnya yang berbasis NU maka kultur dan tradisi keagamaannya yang muncul disana adalah NU.

4. Kondisi Sosial – Budaya

Desa Prajjan adalah sebuah desa yang terletak dibagian timur kabupaten sampang. Secara tetorial, desa prajjan berada di bawa pemerintahan kabupaten sampang, desa prajjan terdiri dari dua dusun yaitu dusun selatan dan dusun utara. Namun yang paling popular di wilayah padukuhan di desa prajjan, khususnya di masing – masing dusun adalah adat tradisi Rabbe (sedekah bumi) dan acara maulud nabi secara bersama oleh seluruh warga masyarakat di masing-masing dusun. Kegiatan adalah salah satu kegiatan bersama yang dilakukan untukmenghormati lahirnya nabi Muhammad, dan pada saat itu pula kesenian tradisional mendapatkan porsi dominan untuk diapresiasi di dalam pertunjukan.

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi mayoritas penduduk desa prajjan terbilang menengah. Sumber ekonomi penduduk desa prajjan yang mata pencahariannya antara lain bertani, dagang, dan lain – lain. Seperti berdasarkan tabel di bawah ini.[67]

[67]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel IV
Mata Pencaharian Penduduk
Desa Prajjan

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	9
2.	Tani	221
3.	Pengusaha kecil menengah	125
4.	Tukang kayu/Batu	49
5.	Kusir Dokar/Becak	20
6.	Jasa	134
7.	Lainnya	7
	Jumlah	565

Sumber : Dokumen Prajjan 2007

Dari uraian diatas, sangatlah jelas bahwa mayoritas penghasilan penduduk desa prajjan dari bercocok tanam baik sebagai pemilik tanah ataupun sebagai pengelola lahan orang lain. Dari jumlah tani dan hasil usaha lainnya, ternyata jumlah penghasilan yang diperoleh tidaklah sesuai dengan usaha keras para petani sehingga warga desa prajjan terobsesi untuk mengais rizki di daerah lain seperti halnya merantau keluar negeri karna penghasilannya lebih besar.

6. Keadaan Pendidkan

Pendidikan merup factor yang sangat dominan guna mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, selain dengan pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mengangkat dan meningkatkan kualitas suatu negara karena dengan adanya pendidikan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan cara mengikuti kegiatan suatu pendidikan. Seperti tabel dibawah ini[68]

Tabel V

Tingkat Pendidikan Penduduk

Desa Prajjan

NO.	Nama Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	216
2.	TK	40
3.	SD	171
4.	SLTP	92
5.	SLTA	118
6.	Sarjana S1 – S3	3
	Jumlah	640

Sumber: Badan Pusat Statistik 2007

7. Kondisi politik

Secara obyektifitas desa prajjan memang relevan untuk dijadikan obyek penelitian yang berkenan dengan karekteristik masyarakat prajjan dan partisipasi politiknya, karena keberadaan penduduk desa prajjan yang muslim dan juga bependidikan setingkat menengah ke atas secara tidak

[68]Badan Pusat Statistik Kabupaten Sapang, *Kecamatan Camplong Dalam Angka* (Sampang: BPS, 2007), hal 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung tentu saja sangat mempengaruhi mereka dalam memahami, menilai, dan bagaimana karekteristik dan partisipasi di desa mereka.

B. Gambaran Umum Pesantren Nazhatut Thullab

1. Pesantren Nazhatut Thullab

Sejarah pondok pesantren Nazhatut Thullab ini dimulai pada tahun 1702 yaitu oleh Kyai Abdul ‘Allam (Almarhum) yang mengangkat sistem pendidikan agama yaitu klasik kitab kuning atau sering di kenal dengan pondok pesantren salafiyah, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman pada tahun 1932 pondok pesantren Nazhatut Thullab memulai membenah diri yaitu sejak di pimpin oleh generasi ketujuh dari pendiri pertamanya. Sejak preode ini pondok pesantren Nazhatut Thullab mulai menata diri. Bahkan sejak masa itu pondok pesantren nazhatut tuthullab menjadi prisoner sitem pendidikan klasik, yang selanjutnya telah melahirkan berbagai lembaga pendidikan dengan berbagai system yang sama pada masanya. Dan hingga kini pondok pesantren Nazhatut Thullab telah berusia tiga abad lebih, dihitung sejak berdirinya.

Dan saat ini pondok pesantren Nazhatut Thullab di pegang oleh generasi yang ke Sembilan dan memasuki era ini, terdapat bentuk transformasi sosial yang dialami pondok pesantren Nazhatut Thullab. Yaitu, transformasi pemikiran yang terjadi di kalangan keluarga pesantren, masyarakat di lingkungan pesantren. Dan, transformasi tentang system pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pondok pesantren Nazhatut Thullab sudah mengalami bentuk transformasi sosial tersebut. Dimana pondok pesantren Nazhatut Thullab telah bermeta morfosa dari pondok pesantren yang awalnya salaf menjadi pondok pesantren yang berbasis komprehensif.[69] Pondok pesantren Nazhatut Thullab telah memiliki sistem pendidikan formal berupa sekolah dari jenjang TK hingga STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) yang kegiatannya dilaksanakan mulai pagi hari hingga sore, sedangkan kegiatan pesantren dilaksanakan pada malam hari. Pondok pesantren Nazhatut Thullab memang pada awalnya merupakan pesantren salaf, jadi kegiatan seperti mengaji Al-qur'an dan kitab kuning tetap dilaksanakan yang waktunya dilakukan pada sore hari sampai malam. Pesantren Nazhatut Thullab pada awal berdirinya merupakan pesantren salaf, namun seiring perkembangan zaman dan semakin terbukanya sistem teknologi dan informasi, tidak mau membuat pesantren harus menyesuaikan sistem pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

Untuk pemegang tombak kekuasan tertingngi di pesantren Nazhatut Thullab masih tetap dipegang oleh Kyai, namun tidak semua bidang kyai yang dipimpin oleh kyai, kyai disini hanya selaku penasehat dan pemberi izin, sedangkan untuk semua tugas operasional dari mulai mengurus santri, mengajar tidak lagi di *handle* oleh kyai seperti pada masa

[69] Hamzah Tualeka menyebut pesantren yang memiliki sistem pendidikan formal seperti sistem persekolahan dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi dan yang masih menggunakan metode klasik seperti sorogan, wetonan dan bandongan dalam sistem pengkajian ilmu-ilmu agama melalui Kitab-kitab salaf disebut dengan Pondok Pesantren Komprehensif (PPK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dulu. Karna untuk institusi seperti sekolah formal yang lain sudah ada bidangnya masing masing.

Bergeser ke ranah politik dan perempuan, sampai saat ini persoalan tentang perempuan dan politik masih saja menjadi polemik yang tak kunjung usai dan selalu menarik untuk diperbincangkan, baik perempuan tersebut berlatar belakang pesantren ataupun tidak. Akan tetapi untuk perempuan dan politik perempuan yang berlatar belakang pesantren lebih mendapat sorotan, karna perempuan pesantren lebih dikenal dengan konteks konteks agama. Hal ini disebabkan adanya fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, definisi, dan nilai-nilai yang dikandung dari politik selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, dan dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa, dimana laki-laki yang pantas untuk mendudukinya sedangkan perempuan masih sangat tabu untuk ikut serta ke ranah politik.

1. Pandangan Komunitas Pesantren Nazhatut Thullab Terhadap Perempuan di Ranah Politik

Berbicara mengenai perempuan dan politik pondok pesantren nahatut thullab mempunyai makna tersendiri terhadap perempuan yang terjun ke ranah politik, tentu saja pandangan tersebut tidak lepas dari latar belakan kultur yang dibangun oleh pondok pesantren. Dalam hal ini pondok pesantren Nazhatut Thullab bukanlah pondok yang tradisional, maka bukan tidak mungkin apa bila mereka memiliki pandangan lebih beragam dalam memaknai perempuan pesantren diranah politik. Beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan perempuan pesantren mengenai makna perempuan di ranah politik adalah sebagai berikut:

> "Makna perempuan pesantren diranah politik adalah hal yang wajar di jaman demokrasi ini siapa saja berhak untuk mengeluarkan suara, menuangkan aspirasinya, karena bagi saya setiap manusia mempunyai hak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik dari yang kalangan pesantren atau masyarakat biasa. Hal tersebut adalah sah-sah saja, memang untuk seorang perempuan sepertinya tidak pantas jika harus berada di ranah politik itu menurut orang orang yang belum menyadarinya saja, kalau saya tidak, selagi perempuan itu bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kenapa tidak.[70]

Dari petikan wawancara diatas bisa di katakan bahwasannya kyai pengasuh pondok Nazhatut Thullab sudah terbuka mengenai perempuan yang berkecimpung dan berkarir di dunia perpolitikan Tanah Air. Ia juga menilai bahwa perempuan manapun boleh berpolitik terlepas dari status sosial yang dimiliki masing-masing dari mereka. Entah itu berasal dari kalngan masyarakat biyasa, atau keturunan kyai dan bahkan seorang santri yang umumnya dikenal atau diyakini bahwa mereka merupakan tipekal perempuan yang 'alim' dalam artiyan mereka 'jarang' bersosialisasi dengan laki-laki yang bukan mahromnya dengan alasan maksiat seperti yang diajarkan dalam pendidikan mereka selama didalam pesantren dimana dikatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita adalah masksiad untuk dilihat, didengar oleh laki-laki yang bukan mahromnya (hubungan darah).

[70] Wawancara di Pesantren Nazhatut Thullab. Kh.muhammad bin muafi, pengasuh pondok pesantren Nazhatut Thullab, tanggal 28 desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga pesantren yang lainnya memandang makna perempuan pesantren di ranah politik sebagai sesuatu hal yang besar yang patut diapresiasi, agar perempuan tidak selalu hanya berada di rumah saja. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nyai Pesantren Nazhatut Thullab:

> "Perempuan bergabung di dalam sebuah organisasi baik itu sekedar ruang lingkup kecil atau sampai pada sekala besar seperti terjun ke dunia parpol hingga menjadi anggota dewan (DPR) hal tersebut saya anggap adalah sebuah hal yang sangat istimewa, kenapa saya katakan demikian, karna tidak ada larangan untuk melakukan hal kebaikan, bukankah kalau sudah berada di ranah politik hal tersebut dikatakan mengabdikan dirinya kepada masyarakat, apalagi orang tersebut berasal dari pesantren, malah semakin bisa mengayomi masyarakat, jadi menurut saya itu adalah hal yang wajar."[71]

Dari wawancara yang disampaikan oleh ibu nyai dari pesanteren Nazhatut Thullab dapat disimpulkan bahwa ia menilai merupakan sesuatu yang sangat istimewa apabila ada seorang perempuan terjun kedunia politik yang berasala dari kalangan pesanteren entah itu seorang nyai atau hanya sekedar santri, entah itu hanya sebagai pengurus parpol atau sebuah organisasi di tingkat desa atau bahkan menjadi sebagai anggota dewan.

Memahami arti bergabung/berpartisipasi yang dimaksud oleh ibu nyai diatas dikatakan sangatlah luas mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat

[71] Wawancara di Pesantren Nazhatut Thullab Nyai, Hj. Nur Jihan pengasuh pondok pesantren Nazhatut Thullab, tanggal 28 desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu baik bersekala regional maupun nasional.

Menurutnya hal itu merupakan sebuah kebaikan karena mereka bisa mengabdikan diri mereka pada masyarakat, selama tujuannya untuk melakukan kebaikan tidak ada batas bagi mereka (perempuan) untuk melakukan kebaikan, walaupun itu dengan cara menjadi seoraang anggota legislatif.

Pendapat yang disampaikan oleh ibu nyai diatas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partispasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat indifidual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legel atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi perempuan di bidang politik sangat dibutuhkan karena masyarakat perlu memiliki pandangan-pandangan yang seimbangan diantara kebutuhan laki-laki dan perempuan dan persyaratan-persyaratan. Selain itu kebijakan publik yang dirumuskan juga harus merepresentasikan kepentingan keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Juree Vichit-Vadakan[72].

[72] Juree Vichit-vadakan, Under-Rebresentation of Wpmen in The Politics, 2004, *Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan partisipasi politik, kita akan mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.[73]

Pendapat senada juga dikemukakan oleh salah satu keluarga Pesantren Nazhatut Thullab yang mengemukakan bahwa:

> "Perempuan pesantren yang ikut serta meramaikan panggung perpolitikan di Indonesia adalah hal yang biasa, dan hal itu bisa menjadikan sebuah contoh nyata terhadap masyarakat bahwa perempuan juga sebenarnya boleh dan juga bisa untuk meyalurkan aspirasinya, hingga sampai di kursi dewan (DPR), mengingat pola pikir masyarakat masih sangat terbelakang tentang perempuan dan politik, jadi jika di mulai dari perempuan pesantren yang terjun ke ranah politik, mungkin masyarakat biasa juga bisa meniru dan melakukannya juga."[74]

Dari hasil wawancara dengan ustad yang mengabdikaian dirinya di pesantren Nazhatut Thullab dapat disimpulkan bahwa di indonesia permpuan yang terjung langsung di dunia politk bukanlah sesutu yang baru. Hanya saja masyrakat madura khususnya masyarakat sampang umumnya memiliki kultur budaya yang masih tetap kental denan budaya patriaki dalam struktur sosio-religius yang menempatkan posisi laki-laki berada di atas sebagai seorang pemimpin. Karena hal itulah

[73] Roy C. Marcridis dan Benard E. Brown, *Perbandingan Politik,* (Jakarta: Erlangga, 1992), 349.

[74] Faads maushuf, ustadz pesantren Nazhatut Thullab, wawancara tanggal , 01 desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh masyarakat perempuan diranah politik merupakan sesuatu yang masih baru. Sehingga dengan ikut sertanya perempuan dari kalangan pesantren keranah politik diharapkan bisa menjadi contoh untuk memutifasi masyarakat sampang lainnya khusunya perempuan untuk ikut serta mengambil peran dalam perpolitikan di kabupaten sampang.

Lain dengan pandangan beberapa ustadz yang mengajar di pesantren Nazhatut Thullab, sepenuhnya mereka mendukung perempuan baik yang dari pesantren ataupun dari kalangan biasa berada di ranah politik, hal itu menunjukkan bahwa perempuan tersebut sudah mulai terbuka terhadap peran perempuan di sector politik, alasan mereka memberikan dukungan ini karana mereka yakin jika kaum perempuan ikut serta berpolitik perempuan tersebut bukan semata untuk mencari nafakah saja, melainkan untuk berdakwa serta memberikan sumbangsih terhadap masyarakat sampang melalui media politik, baik legislatif atau yudikatif, dengan catatan tidak melupakan kondratnya sesungguhnya sebagai seorang wanita.

> "Saya kira perempuan berpolitik itu sah sah saja, karna pada dasarnya mereka berpolitik bukan untuk hanya sekedar mencari nafakah, melainkan juga ada unsur dakwah dan ingin member sumbangsih atau manfaat untuk ummat (masyarakat samapang) melalui media politik (DPR) dan ini sah sah saja dalam islam, hanya saja dengan catatan seperti kewajiban seorang istri dan seorang ibu jangan sampai terabaikan, karana ketika hak (menjadi DPR, kantoran dan semacamnya adalah hak semua orang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban bertanggung jawab terhadap rumah tangga adalah kewajiban yang harus di dahulukan dan diutamakan."[75]

Pendapat yang tak jauh beda juga disampaikan oleh ustadz lainnya yang juga menilai perempuan juga layak berada di sector politik dengan syarat sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga dan juga tidak melupakan kewajibanya sebagai wanita serta juga bisa menjaga diri dari peraturan yang melanggar syari'at islam.

"Yang penting mb, saat berpolitik dia itu bisa aman dari fitnah dan bisa menjaga diri, tidak terpengaruh oleh peraturan yang menyalahi syariaat, mislanya di DPR ada peraturan perempuan dilarang memakai kerudung dan menyarankan memakai rok mini, maka dalam hal ini dia tidak boleh terpengaruh karena mafsadhahnya lebih besar daripada modhorotnya, dan terakhir wajib atas izin suami jika dia bersuami, kalu suami tidak mengizinkan maka dia tidak boleh, karna bila seorang anak ridhollahi fi ridhol walidaini, jika seorang istri maka ridhollahi fi ridha zaujihi, ya intinya mbak bila tidak bertentangan dengan kewajibannya maka sah sah saja seorang perempuan berpolitik, berkarir dan sebagainya, dengan catatan catatan yang tadi." [76]

Sejatinya benar bahwa perempuan memang kodrati berada dalam lingkungan domestik (rumah tangga) secara tidak langsung memang menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri untuk terjun ke ranah politik. Dan saat kita korelaikan terhadapap tugas perempuan sebagai seorang ibu dan seorang perempuan yang masuk ke ranah politik atau berkarir, tentunya hal inilah yang menjadikan sebagian perempuan dan banyak laki-laki yang kemudian merasa khawatir bahwa perempuan yang berkarir

[75] Faads maushuf, ustadz pesantren Nazhatut Thullab, wawancara tanggal , 01 desember 2014

[76] Mustain, ustadz pesantren Nazhatut Thullab, wawancara tanggal , 01 desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduniaa politik tidak bisa membagi waktunya atau bahkan kemungkinan mereka akan lalai dengan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Dan karena itulah banyak yang menilai bahwa perempuan tidak pantas berada atau berkarir di dunia politik karena dikhawatirkan akan lalai dengan tanggung jawabnnya. Apa lagi masyarakat Madura menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan. Posisi perempuan yang demikian inilah kemudian menjadikan masyarakat Madura sangat menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dalam pandangan orang Madura perempuan trutama istri merupakan simbol kehormatan rumah tangga atau laki-laki Madura. Gangguan terhadap istri atau perempuan ditafsirkan sebagai pelecehan harga diri orang madura. Kasus inilah yang sangat potensial mengarah pada terjadinya carok. (Abdurrahman, "Masalah carok dimadura" dalam madura III (kumpulan makalah-makalah seminar tahun 1979), Jakarta: Departemen P dan K, 1979, hal, 42-56).

Jika disimpulkan dari penjelasan di atas, terdapat sebuah komplikasi yang diberikan oleh laki-laki mengenai posisi kaum perempuan di Kabupaten Sampang. Disatusisi, perempuan adalah kaum yang sangat dihargai, dihormati dan dilindungi. Kaum perempuan diberikan keistimewaan secara finansial dan sangat dimuliakan dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Namun disisi lain, hal itu secara implisit menempatkan posisi perempuan di ranah domestik. Penempatan semacam itulah yang dijadikan alasan bagi kaum laki-laki untuk menghambat kiprah perempuan diranah publik dalam hal ini bidang politik. Dan kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berkecimpung di luar ranah domestik bagi kaumperempuan sangat sulit sekali ditumbuhkan. Mengingat kuatnya hegemoni dan dominasi kaum laki-laki serta ditambah dengan pembenaran sistem semacam itu oleh budaya dan sistem keagamaan.

Padahal menurut Aisyah kedudkan perempuan adalah erat kaitannya dengan posisi. Posisi adalah situasi atau kesuksesan seseorang dalam struktur sosial. Dan bila dikaitkan dengan aspek penilaian, tinggi atau rendah, maka sudah menggambarkan status dari posisi terebut.[77]

Laki-laki dan perempuan dapat menjadi penguasa atau pemimpin atau beroposisi dalam arti menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebatilan. Q.S. At-Taubah: 9:21. Al- Zamaksyari, dalam pembahsannya ini bercerita tentang Balqis dan Sulaiman, kalimat dalam ayat ini menunjukkan, adanya pengertian pemegang otoritas, tentu bukan saja dalam ruang lingkup domestik seperti rumah tangga, tetapi juga diwilayah publik.[78]

Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak-hak politik dalam sistem dan konsep islam telah banyak pendapat diungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara perempuan dan laki-laki dalam masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa islam

[77] Dr. Ismah Salaman, *Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah, (*Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban, (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hlm 114

[78] Ali Munhanif, *Perempuan Dalam Islam Klasik,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm, 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan dah mengakui hak-hak politik bagi perempuan kecuali menjadi pemimpin Negara. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah agama, fiqih, atau kustitusi, melainkan masalah sosial dan politik.[79]

Islam menyatakan bahwa, perempuan bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki. Sebaliknya perempuan adalah pelengkap laki-laki dan laki-laki adalah bagian dari perempuan. Hal itu berdasarkan dalam Alquran yang menyatakan bahwa:.... *sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.....”* (AL-Imran;195). Rasulullah SAW bersabda; “Sebenarnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki”. Di dalam islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan atas hak perempuan atau penzaliman atas perempuan demi kepentingan kaum laki-laki sebab islam adalah Syariat Allah SWT yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus.[80]

Sedangkan wacana fiqih yang berpandangan moderat dan rekomendasi *Lajnah al-Fatwa al-Azhar* Juni 1952/ Ramadhan 1381 H. Mengakui hak-hak politik perempuan untuk hak pilih dan dipilih menjadi pemimpin negara.

Dari hasil wawancara dengan keluarga pesantren Nazhatut Thullab mengenai pandangan pesantren dalam memaknai perempuan diranah

[79] Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender dalam Islam,*cet I (Jakarta: Amzah Grafika Offset,2002), hlm, 36

[80] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita.*(Jakarta: GEMA INSANI PRESS,1997),1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik ialah, merupakan sesuatu yang sangat luarbiasa apabila ada seoang perempuan terjun kedunia politik yang berasal dari kalangan pesantren baik itu seorang nyai ataupun hanya sekedar santri bahkan kalangan orang biasa, baik hanya sebagai pengurus parpol atau sebuah organisasi di tingkat desa atau bahkan menjadi sebagai anggota dewan.

2. Perubahan Penerimaan Komunitas Pesantren Nazhatut Thullab Terhadap Perempuan di Ranah Politik

Perubahan yang terjadi di pesantren Nazhatut Thullab dalam mendukung perempuan di sector politik sudah mulai terjadi sejak kepemimpinan kiayi Muafi zain dan dapat dilihat mulai dari keluarga pesantren yang juga ikut mencalonkan salah satu keluarganya (anak perempuannya) menjadi anggota DPR hal ini seolah menjadi bukti bahwa keluarga Nazhatut Thullab sudah mulai tidak menjadi makelar politik saja yang hanya berperan mendulang suara untuk kandidat yang datang memminta dukungan kepada pihak pesantren.

Keberanian pihak keluarga pesantren untuk terjun langsung dalam gelanggang politik (mencalokan salah satu keluarga mereka) menjadi implikasi nyata dalam perubahan pesantren sebagai bukti bahwa pesantren Nazhatut Thullab mulai terbuka dan mendukung perempuan di ranah politik .

> "Disini kami memang sejak kepemimpinan kepengurusan KH Muhammad Muafi Zaini (alm) membebaskan keluarga kami, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk bebas mengikuti organisasi apapun, baik dalam organisasi masyarakat ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi politik. Kalau menurut sejarahnya pesantren ini mulai ikut dan mendukung dunia politik, sejak dari kakek saya, Zaini (alm) dan di lanjutkan oleh abah saya, sampai abah saya itu sempat menjadi dewan penasehat partai Golkar di Sampang, sedangkan umi saya adalah seorang aktifis muslimat NU.[81]

Dalam memulai perubahan dalam mendukung perempuann di ranah politik praktek pesantren Nazhatut Thullab tidak semerta merta langsung memulai dengan mencalonkan keluarga mereka di dunia politik yang berskala besar, melainkan memulainya dengan organisasi–organisasi yang berskala kecil yaitu seperti menjadi ketua muslimat baik tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, hal tersebut memang sudah terjadi sejak pada masa Kh. Muhammad zaini yakni pengasuh generasi ke delapan, seperti halnya yang dismapaikan oleh Nyai Hj. Nurjihan Sebagai berikut:

"Setahu saya, sejak saya masuk ke pesantren Nazhatut Thullab pada tahun 80an, saya rasa pesantren ini memang sudah memperbolehkan perempuan ikut dalam organisasi apapun, seperti contohnya mertua saya disini dulu adalah ketua muslimat NU di kabupaten sampang, dan akhirnya juga turun ke saya sampai sekarang saya masih aktif, bukankah organisasi ini sama saja dengan ikut organisasi di ranah politik toh mb, Cuma bedanya muslimat ini dalam ruang lingkup kecil saja, Jadi pesantren Nazhatut Thullab ini sejak dulu memang sudah mendukung perempuan untuk ikut serta dalam bidang organisasi apapun"[82]

[81] Kh.muhammad bin muafi, pengasuh pondok pesantren Nazhatut Thullab, wawancara tanggal 28 desember 2014

[82] Nyai, Hj. Nur Jihan pengasuh pondok pesantren Nazhatut Thullab, wawancara tanggal 28 desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawan cara diatas dikatakan bahwa pihak keluarga pesantren Nazhatut Thullab tidak langsung menerjunkan keluarga mereka (yang perempuan) ke gelanggan perpolitikan nasional, melainkan secara perlahan yakni memulainya atau merintisnya dari tingkat organisasi yang ruang lingkupnya kecil yakni memulainya menjadi sebagai ketua muslimatan NU. Barulah setelah itu secara perlahan memulainya dengan menerjunkan keluarganya untuk ikut serta mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat dua pengasuh di atas, bahwa pesantren Nazhatut Thullab memang aktif dan selalu ikut serta di ranah politik baik itu sebagai pendukung saja, atau bahkan untuk mengirim kandidat dari pesantren sendiri, Kh. Zuhdi ihsan beliau adalah salah satu alumni pesantren Nazhatut Thullab yang memang terbilang alumni yang mengerti tentang masa-masa yang terjadi di pesantren Nazhatut Thullab.

> "Pesantren Nazhatut Thullab ini mb, terbilang pesantren tua yang ada di Madura khususnya di Sampang, kalau di katakana pesantren ini berubah belakangan ini, itu salah mb, karena setahu saya pesantren ini mulai aktif di dunia politik sejak zamannya Almarhm Kh. Muhammad Zaini, pengasuh generasi ke delapan, dan dilanjutkan oleh putranya Kh. Muhammad Mu'afi Zaini (Alm), dan bahkan pada saat Kh. Muhammad Mu'afi Zaini (Alm) beliau juga sangat aktif di ranah politik, dan hal menarik terjadi pada tahun 2005-2009 putrinya yakni nyai zairina ini mencalonkan diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai anggota dewan tetapi waktu itu kalah, jelas hal tersebut di dukung oleh abahnya. [83]

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keluarga pesanten Nazhatut Thullab baru mencalonkan atau mengikut sertakan anak perempuannya untuk terjun langsung ke dunia politik yang lingkupnya lebih besar, yakni mecalonkan diri menjadi sebagai anggota DPRD Sampang pada pemilu legislatif priode 2005-2009. Akan tetapi kala itu anak yang dicalonkan mereka, Nyai Zairina tidak terpilih karena tidak memperoleh dukungan atau suara lebih banyak. Maklum saja pencalonan perempuan untuk menjadi anggota legislatif pada periode tersebut merupakan yang pertama kalinya. Dimana diketahui hanya ada tiga calon saja dan salah satunya dalah Nyai Zairina.

> "Lalu keluarga pesantren kembali mencalonkan lagi anak mereka nyai zairina pada tahun 2009-2014 alhamdulillah mendapatkan kursi, dan yang sekarang ini nyai zairini berarti sudah pencalonannya yang ke tiga kalinya, jadi bukan hal baru lagi di pesantren Nazhatut Thullab ini karena memang sudah menerapkan kebebasan untuk berpolitik terhadap siapa saja sejak dahulu mb".[84]

Dari keterangan yang disampaikan oleh alumni santri diatas diketahu bahwa keluarga pesantren Nazhatut Thullab kembali mencalonkan anak perempuan mereka untuk menjai anggota DPRD

[83] Suja'e masyarakat desa prajjan, wawancara tanggal 28 desember 2014
[84] Kh. Zuhdi Ikhsan. Ketua ikatan Alumni Pesantren Nazhatut Thullab, wawancara di kediamannya 06 januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampang pada pemilu legis latif selanjutnya yakni pada priode 2009-2014. Barulah peda pemilu legislatif pride ini anak perempuan mereka terpilih menjadi anggota DPRD Sampang. Dan sekaligus menjadi satu-satunya anggota DPRD Sampang perempuan untuk yang pertamakalinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh nara sumber seperti pihak dari pesantren, masyarakat dan alumni pesantren Nazhatut Thullab, sejatinya pesantren Nazhatut Thullab ini memang sejak dahulu sudah mulai menerima dan membebaskan perempuan untuk ikut terjun langsung di ranah politik, jadi bukan karna saat ini politik sudah banyak diminati oleh banyak kalangan pesantren Nazhatut Thullab bukan hanya sekedar ikut-ikutan meramaikan panggung perpolitikan saja. Melainkan niat yang sudah tertanam yaitu untuk mengabdikan diri kepada bangsa, serta ingin memberi jalan pada kaum perempuan untuk ikut serta ke ranah politik tanpa merasa adanya beban ke ragu raguan saat ingin menyalurkan aspirasinya di ranah politik.

Keputusan untuk menerjunkan langsung keluarganya sendiri kegelanggan perpolitikan di Sampang dalam konteks regional ataupun nasional tentu saja bukanlah tampa pertimbangngan sebelumnya. Pasalnya selanjutnya sebagai keluarga pesantren dan bisa dibilang sebagai pesanten pertama dan satu-satunya pesantren yang menurunkan langsung keluarganya khusnya anak perempuannya ada tenggung jawab sosial dan budaya yang harus ditanggung oleh pihak pesantren

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat sebagai besar kayai-kyai disampang tidak setuju perempuan terjun langsung ke gelanggan politik.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Max Weber dalam teori tindakan sosialnya. Dalam teori tindakan sosialnya Max Weber mengklasifikaikan teorinya menjadi empan jenis tindakan sosial, dan keputusan pihak kuarga pesantren Nazhatut Thullab mencalonkan sendiri anak perempuannya itu sesuai dengan jenis yang pertama yakni *tindakan rasional*, tindakan ini dilakukan seorang dengan memperhitungkan kesesuaina antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapainya. Disini dikatakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Artinya sebelum menerjunkan langsung anak perempuannya kegelanggang politik tingkat regional ataupun nasional pihak keluarga pesantren sadar bahwa keluarga dan pesantrennya akan dianggap bertolak belakang dengan keyakinan kyai-kyai di Sampang pada umumnya yang meyakini bahwa prempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau memimpin laki-laki.

Selain itu pihak keluarga juga sadar betul jika keputusan tersebut juga akan mulai mengubah pandangan masyarakat dan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyakini masyarakat sampang bahwa tugas perempuan itu hanya di dapur atau melayani suami dan mengurus rumah tangga. Tentu saja pencalonan tersebut sekaligus bisa diartikan pihak keluarga Nazhatut Thullab mengubah sesutu yang sudah menjadi atau dijadikan sebagai budaya oleh masyarakat madura, khusunya masyarakat sampang.

Mereka juga menyadari jika keputusan mereka itu kedepannya juga bakalan dicontoh atau menjadi panutan oleh masyarakat sampang lainnya khususnya perempuan bahwa mereka juga layak untuk maju atau terjun langsung kerenah politik, hal ini tentu saja merupakan sebuah kemajuan bagi kaum perempuan namun bagi masyarakat sampang ini seolah-olah telah mengubah sebuah nilai budaya atau tradisi.

Dengan menerjunkan langsung keluarganya keranah politik tentu saja bisa dikatakan cara yang dilakukan keluarga pesantren sangat efektif atau bisa dikatakan pengaruhnnya untuk mengajak perempuan Sampang bergabung di dunia politik sangatlah besar. Dengan hal ini tentunnya akan membuat perempuan Sampang tidak akan regau atau takut jikalau dipandang sebelah mata jika ikut berpolitik, karena keluarga atau kyai yang biasa menjadi panutan menilai perempuan diranah politik tidaklah masalah. Dengan kata lain pesantren Nazhatut Thullab sukses dalam mengubah cara pandang masyarakat Sampang terhadap perempuan diranah politi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat pada jenis tindakan sosila kedua yakni *teori tindakan rasional nilai*. Menurut model ini seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang muntlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan.

Artinya dalam mengubah cara pandang masyarakat Sampang terhadap perempuan diranah politik, keluarga pesantren tidak hanya memberikan dukungan saja terhadap calon legis latif perempuan Sampang yang mencalonkan diri menjadi anggota legis latif, mereka melibatkan langsung diri mereka dalam memberi dukungan dengan cara menjadikan anak mereka sendiri sebagai alat untuk mengubah cara pandang masayaraka Sampang itu sendiri dengan mencalonkaan anak perempuan mereka maju pada pemilu legislatif.

Tentu saja hal itu bertujuan demi membangun perubahan agar perempuan di Madura khususnya masyarakan Sampang bisa mengatuhi bahwa mereka juga punya kesempat untuk berpolitik dan menjadi seorang pemimpin dan mereka memang sudah memiliki tempat disana yakni berupa kuota keterwakilan perempuan dalam pemerintahan sebesar 30%.

Nilai penting yang muntlak disini ialah mengubah cara pandang masyarakat Sampang terhadap perempuan diranah politik serta mengajak perempuan Sampng lainnya baik yang brasal dari kalangan pesantrren ataupun yang tidak untuk berani berkarir di dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpolitikan di kabupaten Sampang baik bersekala regional maupun nasional.

Keputusan menerjunkan anaknya sendiri kedalam ranah politik ini baru terasa bisa mengubah cara pandang masyarakat Sampang khususnya komunitas pesantren Nazhatut Thullab pada pemilu legislatif tahun 2014 dimana banyak alumninnya yang juga sama-sama memiliki pesantren menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan mereka untuk mendukung nyai zairina pada pemilu legiskatif priode 2014-2019 meskipun pihak keluarga pesantren tidak memintannya.

Salah satu alumni pesantren anhdatu tulab yang sama-sama memiliki pesantren dirumahnya sendiri yang menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungannya ialah KH. Cholili Aziz. Dimana beliau mengatakan kesetujuannya mendukung perempuan pesantren untuk berpolitik agar perempuan pesantren juga sama-sama diberi tempat untuk berkecimpung di duni politik.

"Awalnya saya tidak setujua, barulah pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu saya mulai mendukunnya meskipun pihak pesantren tidak meminta saya untuk mendukung keluarga mereka."

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan perubahan dari penerimaan perempuan pesantren diranah politik juga dapat dilihat dari terpilihnya nyai Zairina menjadi anggota DPRD Sampang pada priode tersebut dan menjadi satu-satunnya anggota legislatif perempuan dan yang pertama mulai dari priode 1971-2014. Tentu saja hal ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlepas dari dukungan keluarga, santri, alumni dari pesantren Nazhatut Thulab serta masyarakat Sampang lainnya yang mulai menerima perubahan posisi perempuan diranah politik.

Perubahan lainnya bisa dilihat pada terjadinnya lonjakan jumlah calon anggota legislatif yang mencalonkan dirinnya untuk ikut dalam pemilu legislatif priode 2014-2019. Jika pada priode sebelumnya yakni 2004-2009 hanya ada tiga kandidat saja yang mendaftar dalam pemilu legislatif dan ketiganya sama-sama tidak terpilih dan hanya satu kandidat saja yang berasal dari kalangan pesantren yakni nyai Zairina. Dipriode selanjutnya sudah ada 7 calon anggota legislatif perempuan yang ikut sertadalam pemilu dimana ketiga calon legislatif termasuk nyai zairina berasal atau berlatar belakang perempuan pesantren.

Perubahan mulai menerimannya masyarakat sampang terhadap penempatan perempuan diranah politik juga dapat dilihat dari pemilu legislatif priode 2014-2019, diamana ada sebanyak 57 calon anggota legis yang mengikuti pemilu dan 15 diantaranya berlatar belakang belakang sebagai perempuan pesantren.

3. Hambatan Perempuan Pesantren untuk Menjadi Anggota Legislatif

a. Hambatan Kelembagaan / Institusi Politik

Institusi politik dalam hal ini partai politik menjadi instrumen paling penting dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Sebab salah satu fungsi yang dimiliki dan harus dijalankan oleh partai politik adalah fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kaderisasi politik. Sistem kepemiluan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik, meskipun sistem daftar calon terbuka sudah mulai diperkenal kan pada pemilu. Dalam sistem yang baru ini, pemilih bisa memilih partai politik, atau parpol dan calon legislatif, atau calon legislatif dari daftar calon. Peraturan pemilihan umum ini diharapkan dapat mendobrak monopoli pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan rakyat. Meskipun demikian, sistem baru ini tidak membawa banyak perubahan.

Pengurus semua partai politik sebagian besar adalah laki-laki yang pada umumnya tidak memiliki perspektif gender. Bila ada ketua atau pengurus perempuan, pada umumnya tidak diposisi kunci dan belum tentu berwawasan gender juga. Seperti yang disampaikan oleh informan Nyai Zairina:

"Sebenarnya tidak sedikit perempuan itu yang juga ingin masuk ke ranah politik, seperti aktifis-aktifis perempuan, yang memang mereka bisa untuk berada di ranah politik, akan tetapi banyak diantara kami (perempuan) yang merasa saat kami mau masuk di ranah politik para elit politik tidak terlalu senang, intinya ya silahkan saja kalau memang mau masuk, berarti kan hanya sekedar dibuat pelengkap saja".[85]

Budaya dan kebiasaan di partai sangat "macho" dan perempuan menjadi terpinggirkan, misalnya: melakukan rapat di malam hari atau bahkan diluar kota dan kurang mendapat porsi yang memadai dalam

[85] Nyai Zairina Mu'afi, salah satu keluarga pesantren yang ikut terjun langsung ke ranah politik, wawancara di kediamannya 07 januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan politik/kaderisasi disemua tingkatan. Menurut nyai Zairini jika sudah keadaan yang dihadapi demikian pendidikan politik saat dibangku kulian menajdi penting untuk bekal mereka saat menghadapi kendala yang demikian ini.

"Ini tentunya menjadi kenda tersendiri yang tidak bisa disepelekan bagi perempuan Sampang untuk terjun diranah politik, kalau mereka punya keluarga mereka akan semakin sulit untuk mengikuti kegiatan kepengurusan partai yang sering dilakukan diluar kota Sampang. Sehingga seolah-olah pendidikan politik di lembaga formal terasa sangat pentingn untuk dijadikan bekal saat hendak terjun diranah politik,"

Kepercayaan yang diberikan pada umumnya juga tidak besar sehingga perempuan menjadi kurang berpengalaman dibanding dengan mitralaki-laki yang mempunyai keleluasaan secara kultur dan struktur dibanding perempuan sejak lama demikian juga di tengah masyarakat masih terjadi peminggiran perempuan sehingga untuk rekrutmen jabatan public oleh parpol maka perempuan masih belum memperoleh porsi semestinya. Untuk perubahannya diperlukan political will dari parpol dengan menerapkan kebijakan khusus sementara atau biasa di kenal dengan afirmasi.

b. Money Politic / Politik Uang

Ironis memang, negeri penganut sistem demokrasi ini, dalam pelaksanaanya selalu di kotori dengan cara-cara yang tidak baik. Money politic kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang "panas", dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Paradigma yang berkembang saat ini tentang perjuangan meraih kursi legislatif itu "mahal" benar adanya. Kampanye ke masyarakat serta "ongkos politik" yang harus dikeluarkan untuk suksesi pemenangan pemilu tidaklah murah. Dan nominalnya terbilang cukup fantastis. Inilah yang menjadi faktor yang cukup signifikan yang menjadikan ciut nyali perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Caleg perempuan yang ada di Sampang umumnya tidak berasal dari kalangan yang mandiri secara ekonomi. Sehingga mereka merasa keberatan untuk membayar 'ongkos politik' yang harus di keluarkan untuk menjadikan dirinya sebagai anggota legislatif terpilih. Hal itulah yang kemudian menghambat perempuan di Sampang untuk berpartisipasi secara aktif di dunia politik.

Adanya informasi praktek politik uang ini sendiri sudah lama beredar dikalangan masyarakan Sampang sehingga semakin menciutkan minat kalangan perempuan sampang untuk ikut berpartisipasi di ranah politik. Hal ini disampaikan oleh informan yang pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif Sampang tahun 2009 yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nyai Zuhroh dari partai PKB. Dimana dikatakan oleh dirinya secara eksplisit adanya uang pendaftaran pada saat proses kandidasi di tingkat partai. Dimana 'ongkos politik' yang diminta jumlahnnya cukup fantastis untuk ukuran masyarakat Sampang.

> "Dulu waktu awal-awal saya mendaftarkan diri, waktu itu keputusan partai mengharuskan saya membayar kepartai sebesar 10 juta. Dengan perjanjiaan akan dikembalikan 7,5 jutanya dengan cara dicicl oleh partai jika tidak terpilih. Tapi saya minta kembalikan 5 juta saja. Sisanya tidak usah dicici anggap saja hilang sebagai uang pendaftaran,"

Keputusan partai yang demikian inilah yang kemudian membuat calon-calon perempuan untuk benar-benar mempertimbangkan keputusan mereka untuk bergabung. Sebab tidak semua perempuan yang mendaftar bisa menjadi calon legis latif walau sudah membayar. Jika sudah demikian bukan tidak mungkin jika hal ini dengan sendirinya menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan sampang untuk bergabung diranah politik, apalagi uang yang mereka gunakan untuk mendaftar didapat dari pinjaman bukan uang sendiri.

c. Hambatan Struktural

1. Hambatan Pribadi dan Psikologis

Dunia politik yang begitu keras yang menuntut perjuangan dan pengorbanan secara penuh, nampaknya memang penyebab dari rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik. Kurangnya rasa percaya diri dari kaum perempuan serta belenggu kodrati yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskan perempuan berada dalam sebuah kewajiban mengurus rumah tangga, merawat keluarga, serta pekerjaan domestik lainnya membuat perempuan menjadi ragu untuk berkontestasi dalam politik.

> "Setelah mencalonkan diri dipemilu legislatif banyak orang yang membicarakan saya, karena mereka menilai saya tidak pantas untuk menjadi anggota dewan. Apalagi saya berasal dari keluarga pesantren ada tanggun jawan besar yang harus saya pertaruhkan karena sesuatu yang berkaitan dengan saya nantinya akan dikaitkan-kaitkan dengan pesanten saya".

Apa yang dirasakan oleh nyai Zairina itu lantaran dirinya merupakan perempuan pesantren yang memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga nama baik pesantrennya. Dimana umumnya ketika perempuan pesantren melakukan 'kesalahan' yang menyalahi aturan seperti yang diajarkan oleh agama maka akan dikait-kaikan dengan sitem pembelajaran yang ditetapkan oleh lembaganya. Karena itulah kemudian keputusan terjun keranah politik ini menjadi beban terndiri bagi perempuan pesantren karena apa yang mereka perbuat akan dihadapkan pada situasi yang mengkai-kaitkan dengan lembaga pesantren.

Hambatan pribadi lainnya ialah kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerjaan dan keluarga. Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap "menerima" tanpa perlawanan (*reserve*) sehingga pada akhirnya kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek dari pada sebagai subjek yang menjadi mitra kaum laki-laki. Hal itu juga dirasakan oleh nyai zairina walaupun dirinnya sudah mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya ia bisa menilai jika dukungan dari keluarga besar menjadi sangat penting sebelum akhirnya memutuskan untuk berkarir didunia politik.

> "Saya merasa dukungan keluarga sebelum terjun keranah politik adalah sesuatu yang sangat penting untuk didapatkan. Karena bisa-bisa nantinnya ketika perempuan itu sudah nyaman berpolitik, tiba-tiba keluara mereka tidak menerima. Penjelasan bagaimana nantinnya kesibukan diluar kemunkinan lebih banyak menuntuk mereka dan mungkin akan membuatnya kesulitan untuk memenuhi peran mereka saat dirumah, hal itu harus dijelaskan pada anak-anaknnya terutama pada suaminya. Tidak mungkin setiap waktu perempuan yang terjun diranah politik bisa bertanggung jawab pada tuntutan peran mereka. Baik perang sebagai seorang ibu rumah tangga ataupun sebagai pengurus dari parpol atau mungkin sebagai anggota dewan."

> "Sehingga bisa dikatakan suksennya perempuan diranah politik itu yang pertama bergantung pada izin dari keluarga mereka sendiri, baru kemudian keatifan dia dikancah perpolitikan serta dukungan dari para kader lainnya dan juga msyarakat disekitar mereka sendiri,"

Sebagai mana yang sudah diketahui perempuan berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan - pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

Peran ganda yang sudah terkodratkan oleh seorang wanita ini serta kemampuan fisiknya yang bisa dikatakan ada dibawah laki-laki karena memang seorang wanita itu ditakdirkan sebagai mahluk yang lemah lembut tidak bisa di jadikan ukuran bahwa kemampuan mereka tidak bisa menyaingi laki-laki atau bahkan bisa melebihi kemampuan laki-laki.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.[86] Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

[86] Murtadlo Muthahari, Hak-hak Wanita dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 1995), cet. Ke-3, h.108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.[87]

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir padaumumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.[88]

2. Hambatan Sosio – kultural

Seperti yang telah dijelaskan di atas dimana posisi perempuan dalam struktur sosial di Kabupaten Sampang, dimana budaya patriarki yang membelenggu perempuan untuk tetap diranah domestik dan tidak tampil keranah politik menjadikan perempuan diranah politik sangat rendah. Mayoritas masyarakat Sampang, masih memandang dengan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki saja. Pemikiran seperti ini tidak jarang yang akhirnya menjadikan paandangan mereka terhadap perempuan selain hanya sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam

[87] Ibid., h.110-111

[88] Kartini Kartono, Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet. Ke-2, h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat tertentu hanya diliha sebagai objek semata. Secara kultural dimana sudut pandang patrinial (laki-laki dilihat lebih tinggi serajatnya) Sebuah hal yang paling di nomersatukan dalam melihat dan menempatkan perempuan, hingga menjadi peranan perempuan selalu diartikan sebagai hal-hal yang bersifat pelengakap laki-laki saja, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendi kehidupan.

> "Nah kebanyakan mb dari kami kaum perempuan ini mengalami hal yang tidak adil atau tidak pantas, dimana masih banyak orang yang beranggapan perempuan itu harus berada setelah laki-laki,"[89]

Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

3. Hambatan Sosial Budaya

Peranan perempuan dalam politik masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar. Budaya ini dapat menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah. Budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak

[89] Nyai Zairina Mu'afi, salah satu keluarga pesantren yang ikut terjun langsung ke ranah politik, wawancara di kediamannya 07 januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dengan menempatkan posisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan. Perempuan juga tidak punya peranan dalam dunia politik.[90] Untuk suatu perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik.

> "Saya rasa hambatan yang paling sulit itu ialah kami dihadapkan pada budaya Patriaki yang sudah menjadi sebuh sistem sosial dilingkungan masyarakat Sampang. Ini kan berarti perempuan yang mencalongkan diri menjadi anggota legislatifa atau yang lainnya dituntut untuk mengubah kontruksi sosial yang sudah ternam di masyarakat sejak dulu. Dimana mereka menganggap dan meyakini posisi laki-laki yang harus ada diatas"

Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dinina bobokkan* dengan konsumerisme, hedonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk

[90] Ibid, hlm, 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.

Temuan dalam penitian ini mengenai masalah hambatan sosial budaya juga ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini[91] dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009" yang menyatakan bahwa kendala utama, yang menjadi penyebab peran politik kaum perempuan masih sangat kurang disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Yaitu budaya patriarki yang masih sangat mengental pada masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan.

Temuan masalah Sosial Budaya yang menjadi kendala dalam penelitian ini juga ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andriana Suasanti dalam skripsinya yang berjudul Partisipasi Politik Perempuan Pesantren (Studi Kasus Partisipasi Politik Perempuan Pesantren Ihyaul Ulum di Kabupaten Gresik), yang mengatakan hambatan Sosial budaya yang dihadapi oleh perempuan pesantren Ihyaul Ulum disebabkan budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering digunakan adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi perempuan.

Dari beberapa hambatan yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dismpulkan bahwa hambatan utama yang mempengaruhi keterwakilan

[91] Siti Nur Aini, *Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009* dalam skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, (Semarang: 2009), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan pesantren di segala bidang, khususnya di dalam lembaga politik adalah karena hambatan budaya. Budaya patriarki yang dengan sempurna memberikan pemahaman kepada seluruh khalayak bahwa tempat yang terbaik bagi seorang perempuan adalah di rumah, dengan sepenuh hati melayani keluarganya.

Paradigma lama bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan terbatas serta hanya berfungsi sebagai pelengkap kaum adam, masih cukup dominan menghinggapi cara berpikir mayoritas masyarakat kita. Hal tersebut membuat perempuan menjadi seperti terkungkung di dalamnya. Memutuskan untuk terjun ke ranah politik bagi perempuan adalah sebuah pilihan dilematis yang seolah-olah dapat membahayakan dirinya sendiri.

Beberapa hambatan lainnya hanyalah merupakan hambatan pendukung yang membuat perempuan semakin takut untuk melakukan partisipasi politik. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengelurkan perempuan dari label dan cap yang buruk melalui pemberian sistem kuota untuk dapat menduduki kursi pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id